Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 33351-33364

Internalisasi Budaya Kerja Sadar Bencana dalam Upaya Pembentukan Masyarakat Tangguh untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang

Dina Eka Agusti[1], Aldri Frinaldi[2]
[1,2]Universitas Negeri Padang
Corresponding Author: Dina Eka Agusti, E-Mail: dinaea28@gmail.com

Published: Juni, 2026

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses internalisasi budaya kerja sadar bencana dalam upaya mewujudkan masyarakat tangguh bencana sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana di Kota Padang melalui program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang dilaksanakan di Kelurahan Padang Sarai, Pasia Nan Tigo, dan Berok Nipah. Informan penelitian terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dan Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode Manual Data Analysis Procedure (MDAP) (Burhan Bungin, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Keltana berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penguatan pengetahuan, persepsi risiko, sikap, dan perilaku sadar bencana. Masyarakat telah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai jalur evakuasi, sistem peringatan dini, serta langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelatihan dan simulasi kebencanaan juga menunjukkan adanya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana. Meskipun demikian, implementasi budaya kerja sadar bencana masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya kepedulian lingkungan pada sebagian masyarakat, serta dukungan kelembagaan yang belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya penguatan komunikasi kebencanaan, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan simulasi yang berkelanjutan, penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, serta penerapan strategi pengurangan risiko bencana berbasis lingkungan guna mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana.

Keywords: Budaya Kerja Sadar Bencana; Masyarakat Tangguh Bencana; Pengurangan Risiko Bencana; Kelurahan Tangguh Bencana; Kota Padang

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat rentan terhadap bencana alam. Situasi ini berasal dari karakteristik geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang kompleks dan saling terkait. Terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama dan di *Ring Of Fire*, Indonesia rentan terpapar berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi (Susetya Herawati, Dadang Subarna, 2021).

Berdasarkan cara terjadinya dan kecepatannya, bencana umumnya diklasifikasikan menjadi dua kategori*: rapid onset disaster* dan *slow onset disaster*. Tsunami termasuk dalam kategori bencana *Rapid on set* karena terjadi tiba-tiba dan tanpa peringatan. Karakteristik ini mengharuskan masyarakat yang tinggal di daerah rawan tsunami untuk menjaga tingkat kesiapan yang tinggi guna meminimalkan dampaknya, baik dari segi korban jiwa maupun material (Lafaila et al., 2022)

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki risiko tsunami relatif tinggi. Kerentanan ini berasal dari letak geografisnya di sepanjang zona subduksi Mentawai, wilayah yang aktif secara tektonik. Beberapa ahli mengatakan bahwa wilayah ini dapat mengalami gempa megathrust hingga magnitudo 8,9 pada skala Richter, yang berpotensi memicu tsunami besar (Sari, 2022). Kota Padang, pusat administrasi dan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, merupakan salah satu daerah yang paling rentan karena kedekatannya dengan Samudra Hindia dan kepadatan penduduk yang tinggi di zona pesisirnya. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Padang tahun 2022

menunjukkan bahwa Kabupaten Koto Tangah memiliki risiko tsunami tertinggi, dengan 101.215 jiwa berisiko. Kabupaten Padang Barat memiliki 38.767 jiwa berisiko, sedangkan Padang Utara memiliki 35.330 jiwa berisiko. Kepadatan penduduk yang tinggi di daerah-daerah rentan ini menggarisbawahi perlunya perhatian khusus terhadap risiko tsunami di Padang, yang membutuhkan implementasi langkah-langkah pengurangan risiko bencana yang terencana dan berkelanjutan

Berikut adalah potensi penduduk terpapat bencana tsunami di Kota Padang (BPBD Kota Padang, 2023)

Table 1. Potensi Penduduk Terpapar Bencana Tsunami di Kota Padang

No.	**Kecamatan**	**Jumlah Penduduk Terpapar (jiwa)**
1.	Bungus Teluk Kabung	7.047
2.	Koto Tangah	101.215
3.	Lubuk Begalung	1.681
4.	Nanggalo	32.582
5.	Padang Barat	38.767
6.	Padang Selatan	19.636
7.	Padang timur	6.497
8.	Padang Utara	35.330

Berdasarkan table diatas, jumlah penduduk terbanyak yang terpapar risiko tsunami berada di kecamatan Koto Tangah dengan total 101.215 orang, dan di kecamatan Padang Barat, dengan total 38.767 orang.

Upaya pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya terbatas pada pengembangan infrastruktur dan peralatan fisik, tetapi juga harus memanfaatkan pendekatan non-struktural yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat. Strategi penting adalah mengembangkan budaya kerja sadar bencana di dalam masyarakat. Budaya kerja sadar bencana dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang tertanam dalam kehidupan individu dan kelompok, yang memungkinkan mereka untuk memahami risiko bencana, mematuhi pedoman keselamatan, dan secara aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko (Gouda & Yang, 2023, dikutip dalam Parassa et al., 2024). Konsep ini sejalan dengan United Nations Office For Disaster Risk Reduction (UNDRR, 2017), yang menyatakan bahwa budaya kesiapsiagaan didasarkan pada pemahaman yang baik tentang persepsi risiko, pengetahuan yang memadai, sikap positif, dan perilaku yang memperkuat kapasitas masyarakat untuk merespons ancaman bencana secara efektif.

Untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, pemerintah kota Padang, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menerapkan program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana). Program ini bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mengidentifikasi potensi ancaman, mengelola sumber daya yang tersedia, dan mampu bertindak secara mandiri dalam menghadapi bencana (BNPB, 2012). Program ini mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan respons bencana di kelurahan masing-masing. Pada tahun 2025, sebanyak 32 kelurahan di kota Padang telah mendapatkan manfaat dari Program Keltana (Kelurahan Tangguh Bencana), termasuk Kelurahan Berok Nipah, Pasia Nan Tigo, dan Padang Sarai, yang menjadi fokus penelitian ini. Partisipasi ketiga kelurahan ini dalam Program Keltana memungkinkan penilaian sejauh mana upaya peningkatan kapasitas masyarakat telah berkontribusi dalam mengembangkan budaya kerja sadar bencana di tingkat lokal.

Meskipun pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan telah menerapkan berbagai program pengurangan risiko bencana, pembentukan budaya kerja yang berfokus pada pengurangan risiko bencana di Kota Padang masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa studi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan manajemen bencana masih rendah dan tidak merata. Kegiatan kesiapsiagaan bencana umumnya terstruktur dan bergantung pada dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Setelah program selesai, intensitas kegiatan ini menurun, dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam praktik masyarakat. Lebih lanjut, jumlah fasilitas serta tempat evakuasi yang terbatas menunjukkan bahwa budaya sadar bencana yang kuat dan berkelanjutan belum terbentuk optimal. Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema "Budaya

Kerja Sadar Bencana dalam Mewujudkan Masyakarat Tangguh untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang".

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif untuk memperdalam pemahaman tentang budaya kerja yang berfokus pada pencegahan bencana dalam konteks pembangunan masyarakat tangguh, untuk upaya pengurangan risiko bencana di kota Padang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan perilaku masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam program Keluruhan Tangguh Bencana (Keltana).

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Padang Sarai, Pasia Nan Tigo, dan Berok Nipah, yang terletak di kota Padang. Kelurahan ini dipilih secara khusus karena merupakan daerah pesisir yang sangat rentan terhadap tsunami, banjir rob, dan bencana pesisir lainnya, serta mendapat pembinaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Padang.

Narasumber dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap program pengurangan risiko bencana. Informan meliputi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, serta Kelompok Siaga Bencana (KSB).

Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen BPBD dan Keltana, laporan bencana, undang-undang dan peraturan, buku, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, analisis dokumen, dan tinjauan pustaka. Data kemudian dianalisis sesuai dengan Prosedur Analisis Data Manual (MDAP) (Burhan Bungin, 2022) yang mencakup langkah-langkah *Open Coding, Axial Coding,* dan *Selective Coding.*

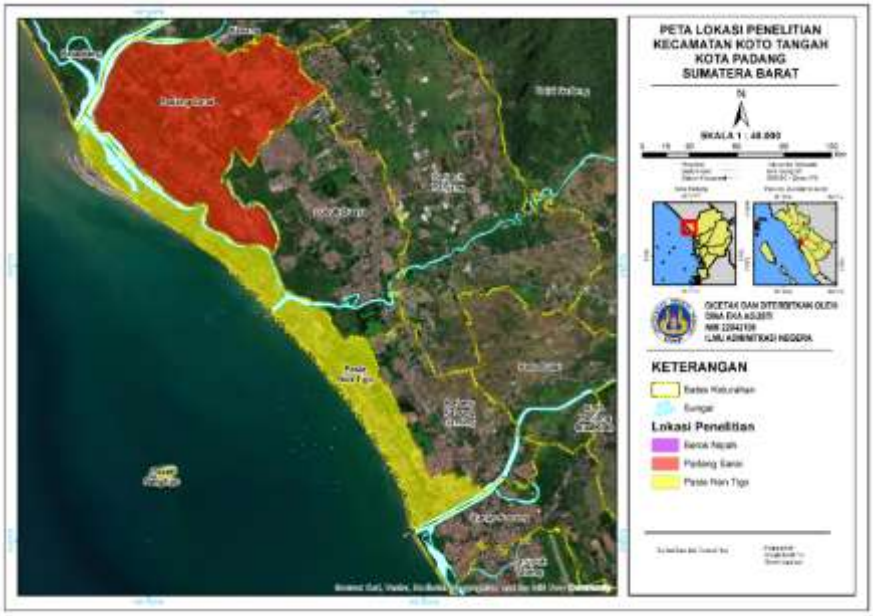
Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber melibatkan perbandingan informasi dari informan yang berbeda, sedangkan triangulasi metode melibatkan perbandingan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data penelitian.

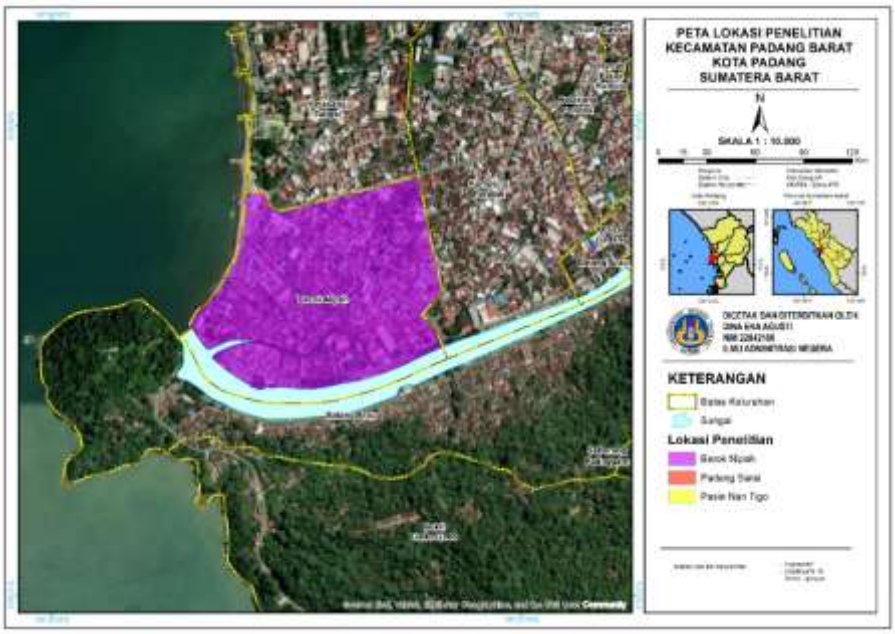
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Padang Sarai, Pasia Nan Tigo, dan Berok Nipah sangat rentan terhadap berbagai bencana, termasuk banjir rob, gempa bumi, dan tsunami. Lokasi geografisnya, yang terletak di pesisir dan di sepanjang sungai, membuat kelurahan ini memiliki risiko bencana yang lebih tinggi daripada daerah lain. Beberapa narasumber mengatakan bahwa banjir rob adalah jenis bencana yang paling sering terjadi dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Ancaman bencana tidak hanya menyebabkan kerusakan materiil dan infrastruktur masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi penduduk.

Gambar 1. Kerawanan Banjir Rob Kelurahan Padang Sarai, Kelurahan Pasia Nan Tigo, dan Kelurahan Berok Nipah





Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Kelurahan Padang Sarai, Pasia Nan Tigo, dan Berok Nipah termasuk di antara daerah yang paling rentan terhadap tsunami dan banjir rob. Risiko tinggi ini terkait dengan karakteristik fisik yang serupa yaotu: lokasi pesisir, elevasi rendah, topografi yang relatif datar, sebagian besar merupakan daerah pemukiman, dan dekat dengan garis pantai. Kondisi ini membuat ketiga daerah ini rentan terhadap banjir dari laut saat air pasang (Badan Informasi Geospasial, 2026).

Dari ketiga daerah tersebut, kelurahan Pasia Nan Tigo memiliki tingkat kerentanan tertinggi. Sekitar 61,37% wilayahnya berada 0-2 meter di atas permukaan laut, dengan sebagian besar wilayah berada dalam jarak 500 meter dari garis pantai. Topografi yang relatif datar menghambat aliran balik air pasang ke laut, yang cenderung memperpanjang banjir. Lebih lanjut, luasnya area pemukiman di dalam zona rentan semakin meningkatkan risiko dan dampak banjir pesisir terhadap penduduk setempat (Badan Informasi Geospasial, 2026).

Kelurahan Padang Sarai juga diklasifikasikan sebagai daerah yang sangat rentan terhadap banjir pesisir. Tidak kurang dari 55,20% wilayahnya terletak di bawah 0-2 meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan yang umumnya landai hingga rendah. Dominasi kawasan permukiman membuat sejumlah besar penduduk terpapar risiko banjir pesisir. Kerentanan ini semakin diperparah oleh kedekatan dengan pantai dan rentang pasang surut yang signifikan, terutama selama hujan lebat yang bertepatan dengan pasang purnama (Badan Informasi Geospasial, 2026b)

Sementara itu, kelurahan Berok Nipah, meskipun ukurannya relatif lebih kecil, tetap sangat rentan terhadap banjir pesisir. Terletak hampir seluruhnya dalam jarak 1.000 meter dari garis pantai, desa ini terutama terdiri dari kawasan permukiman dan aktivitas perkotaan. Kelimpahan permukaan kedap air, seperti jalan dan bangunan, mengurangi kapasitas penyerapan air tanah, sehingga meningkatkan risiko banjir. Selain itu, ketinggian wilayah tersebut, antara sekitar 0 dan 3 meter di atas permukaan laut, dan topografinya yang datar juga berkontribusi pada peningkatan risiko banjir pesisir (Badan Informasi Geospasial, 2026)

Tabel 2. Analisis Open Coding dan Axial Coding

Kategori Fundamental	Sub Kategori	Konsep (Open Coding)	Kutipan Wawancara
Budaya Kerja Sadar Bencana	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebencanaan	Keaktifan anggota KSB, keterlibatan dalam simulasi, kepedulian sosial, perlindungan kelompok rentan, partisipasi masyarakat	"Saya selalu aktif dalam kegiatan KSB dan kegiatan kebencanaan lainnya."
	Peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat	Kesiapsiagaan keluarga, edukasi kebencanaan, pelatihan dan simulasi, pemahaman jalur evakuasi, peningkatan pemahaman masyarakat	"Program Kelurahan Tangguh Bencana sangat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat."
	Sistem komunikasi dan informasi kebencanaan	Penyebaran informasi kebencanaan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem komunikasi kebencanaan, sistem pelaporan bencana, peringatan dini	"Informasi biasanya diperoleh melalui grup WhatsApp RT, BPBD, dan media sosial."
Sadar Bencana dalam Mewujudkan Masyarakat Tangguh Bencana	Pengetahuan dan persepsi risiko bencana	Pemahaman jalur evakuasi, pengetahuan lokal kebencanaan, pemahaman sistem peringatan dini, identifikasi risiko berbasis masyarakat	"Masyarakat memahami jalur evakuasi, zona aman dan langkah penyelamatan diri."
	Sikap kesiapsiagaan masyarakat	Kesadaran mengikuti kegiatan kesiapsiagaan, kepedulian sosial, kewaspadaan terhadap ancaman bencana	"Kesiapsiagaan sangat penting untuk keselamatan diri sendiri dan masyarakat sekitar."
	Perilaku sadar bencana	Menyiapkan tas siaga, menentukan titik kumpul keluarga, mengikuti pelatihan kebencanaan, respons cepat terhadap informasi bencana	"Kami sudah menyiapkan titik kumpul keluarga, tas siaga dan dokumen penting."
Faktor Penghambat Budaya Kerja Sadar Bencana	Keterbatasan sumber daya	Keterbatasan dana, kurangnya perlengkapan keselamatan, keterbatasan alat komunikasi, minimnya dukungan operasional	"Kendala utama adalah keterbatasan dana dan perlengkapan keselamatan."
	Keterbatasan sarana dan infrastruktur	Infrastruktur pengendalian banjir belum optimal, perlindungan wilayah pesisir belum memadai, sarana kebencanaan terbatas	"Masih membutuhkan perbaikan infrastruktur dan perlindungan wilayah pesisir."
	Dukungan kelembagaan yang belum optimal	Dukungan pemerintah terbatas, keterbatasan bantuan, swadaya anggota KSB	"Sebagian besar kebutuhan kegiatan masih menggunakan dana pribadi anggota KSB."

Kategori Fundamental	Sub Kategori	Konsep (Open Coding)	Kutipan Wawancara
Upaya Peningkatan Budaya Kerja Sadar Bencana	Penguatan komunikasi kebencanaan	Sosialisasi berkelanjutan, penyebaran informasi melalui teknologi, edukasi masyarakat	"Informasi disampaikan melalui grup komunikasi masyarakat dan kegiatan sosialisasi."
	Penguatan kapasitas masyarakat	Pelatihan kebencanaan, simulasi rutin, pendidikan kebencanaan, peningkatan kesiapsiagaan	"Masyarakat sering mengikuti pelatihan, diskusi, simulasi dan pertemuan rutin."
	Penguatan kelembagaan dan kolaborasi	Kerja sama BPBD, KSB, PMI, NGO, tokoh masyarakat, pemerintah kelurahan	"Penanganan melibatkan BPBD, kecamatan, kelurahan, relawan dan NGO."
	Pengurangan risiko berbasis lingkungan	Kesadaran menjaga lingkungan, pengelolaan sampah, pemantauan wilayah, adaptasi masyarakat	"Program memberikan edukasi untuk tidak membuang sampah sembarangan."

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Berdasarkan analisis dinamika internalisasi budaya kerja sadar bencana di masyarakat, kesadaran akan bencana di dalam masyarakat telah berkembang positif karena keterlibatan BPBD, masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam berbagai kegiatan terkait bencana, seperti Kelompok Siaga Bencana (KSB), pelatihan, simulasi, dan penyebaran informasi tentang risiko bencana. Kegiatan-kegiatan ini berkontribusi pada penguatan kapasitas masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang potensi risiko bencana di masyarakat. Dari perspektif kesadaran akan bencana, masyarakat kini memiliki pengetahuan yang cukup mengenai jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan tindakan penyelamatan diri jika terjadi bencana. Pengetahuan ini diimplementasikan menjadi sikap dan perilaku yang semakin proaktif, seperti menyiapkan perlengkapan darurat, berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi, dan terlibat dalam berbagai program manajemen bencana yang diselenggarakan oleh instansi terkait.

Namun, penerapan budaya kesadaran akan bencana masih menghadapi beberapa kendala. kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur dan peralatan pendukung yang tidak memadai, serta dukungan kelembagaan yang kurang. Kondisi ini berdampak pada efektivitas upaya pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, berbagai langkah penguatan diperlukan, seperti peningkatan komunikasi dan pendidikan.

1. **Budaya Kerja Sadar Bencana dalam Mewujudkan Masyarakat Tangguh untuk Pengurangan Risiko bBencana di Kota Padang**

   Budaya kerja sadar bencana merupakan hasil kombinasi antara budaya kerja dan budaya sadar bencana masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. (Frinaldi, 2017) menjelaskan bahwa budaya kerja ini dapat diukur melalui beberapa indikator: kepemimpinan, Penampilan, kesadaran akan waktu, komunikasi, penghargaan dan pengakuan, serta nilai dan kepercayaan. Sedangkan sadar bencana menurut (UNDRR, 2017) dalam (Raditya Jati, Lu'lu Muhammad, 2024) dapat diukur melalui indikator: Persepsi risiko, pengetahuan, sikap dan perilaku. Dalam penelitian ini, konsep budaya kerja tidak terbatas pada aparat BPBD kota Padang sebagai badan yang bertanggung jawab melaksanakan programKelurahan Tangguh Bencana, tetapi juga mencakup masyarakat, yang merupakan penerima manfaat dan partisipan aktif dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan demikian, budaya kerja yang peka terhadap bencana dipahami sebagai seperangkat nilai, sikap, dan perilaku yang berkembang baik di dalam pemerintahan maupun masyarakat untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana.

A. Budaya Kerja

1) Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan, memengaruhi, dan memobilisasi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan memainkan peran penting dalam implementasi Program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) di Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Padang telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesadaran risiko bencana dengan menjadikan program Keltana sebagai salah satu prioritasnya. Komitmen ini tercermin dalam alokasi anggaran yang berkelanjutan sejak tahun 2021 dan implementasi pendampingan intensif di kelurahan-kelurahan yang paling berisiko. Hingga saat ini, BPBD telah memfasilitasi 32 dari 104 kelurahan di Padang (BPBD Kota Padang, 2023).

Gaya kepemimpinan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bersifat partisipatif. Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah kecamatan dan kelurahan, tokoh masyarakat, relawan penanggulangan bencana, dan Kelompok Siaga Bencana (KSB), dalam setiap kegiatan pengurangan risiko bencana. Sebelum implementasi program, BPBD melakukan koordinasi dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan yang disampaaikan oleh (Frinaldi, 2017)yag mengatakan bahwa bahwa kepemimpinan berfungsi untuk memengaruhi dan membimbing individu menuju pencapaian tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, kepemimpinan yang dilakukan BPBD dalam menciptakan budaya kerja sadar bencana telah berkontribusi dalam memobilisasi berbagai *stakeholder* untuk mendukung terciptanya komunitas yang tangguh terhadap bencana.

2) Penampilan

Penampilan mencerminkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas seseorang dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian, pentingnya penampilan dalam program Kelurahan Tangguh Bencana terlihat dari bagaimana staf dan fasilitator dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang berinteraksi dengan masyarakat. Staf BPBD mengenakan seragam selama operasi lapangan, yang berfungsi sebagai elemen identitas institusional dan simbol akuntabilitas dalam manajemen bencana. Kehadiran fasilitator yang mengenakan seragam dan uniform resmi ini memperkuat citra profesional dan memfasilitasi identifikasi publik terhadap mereka yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut, pendekatan BPBD dan fasilitatornya memprioritaskan partisipasi masyarakat melalui diskusi, berbagi pengalaman terkait bencana, dan keterlibatan aktif di setiap tahap kegiatan. Peserta Program Keltana juga mengenakan seragam untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok selama kegiatan. Identitas ini memfasilitasi koordinasi dan pengenalan peserta selama pelatihan dan simulasi bencana. Pengamatan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh (Frinaldi, 2017) yang menganggap penampilan sebagai elemen budaya dari instansi yang berkontribusi pada citra organisasi yang positif dan peningkatan kepercayaan publik terhadap program tersebut.

3) Kesadaran Akan Waktu

Manajemen waktu terkait dengan kemampuan menggunakan waktu secara efektif, menunjukkan disiplin dalam menyelesaikan tugas, dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek ini tercermin dalam perencanaan dan implementasi program Kelurahan Tangguh Bencana. Sebelum kegiatan dimulai, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan jadwal dan menguraikan tujuannya serta mengkoordinasikan tindakannya dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.

Yang perlu diperhatikan, BPBD tidak memaksakan jadwal yang kaku kepada masyarakat. Waktu kegiatan ditentukan secara kolaboratif antara fasilitator dan peserta, dengan mempertimbangkan kegiatan dan beban kerja masyarakat yang ada. Pendekatan fleksibel ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Lebih lanjut, manajemen waktu ini juga terlihat dalam respons cepat BPBD terhadap laporan bencana, berkat Padang Command Center dan layanan darurat 112 di pusat pengendalian

operasi BPBD Kota Padang, yang dapat merespons laporan dalam waktu sekitar 10 hingga 15 menit, bahkan di daerah yang relatif terpencil. Temuan ini menunjukkan bahwa BPBD tidak hanya teliti dalam perencanaan programnya tetapi juga sangat siap untuk memberikan layanan bantuan bencana kepada masyarakat.

4) Komunikasi

Komunikasi adalah sarana utama untuk menyebarkan informasi dan membangun pemahaman bersama guna mencapai tujuan organisasi. Dalam hal kebencanaan, komunikasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kesiapsiagaan, dan meningkatkan partisipasi. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi merupakan faktor kunci keberhasilan program Kelurahan Tangguh Bencana Kota Padang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menerapkan model komunikasi terbuka, partisipatif, dan dua arah, yang melibatkan administrasi kecamatan dan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, relawan, dan berbagai pemangku kepentingan masyarakat lainnya.

Sebagai bagian dari proses dukungan, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana di wilayah mereka. Hal ini memastikan mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat program tetapi juga berpartisipasi aktif dalam pengurangan risiko bencana. Selain komunikasi langsung, BPBD menggunakan berbagai platform komunikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan jaringan Grup Kesiapsiagaan Bencana untuk menyebarkan informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan komunikasi dalam pelaksanaan program relatif rendah, karena kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan komunikasi yang efektif antara BPBD dan masyarakat, sehingga berkontribusi pada keberhasilan program pengurangan risiko bencana.

5) Penghargaan dan Pengakuan

Penghargaan dan pengakuan merupakan bentuk penghargaan kepada individu atau kelompok yang telah berkontribusi pada suatu kegiatan. Penelitian menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang memberikan penghargaan kepada masyarakat, relawan, fasilitator, dan pemangku kepentingan lainnya yang aktif mendukung program Kelurahan Tangguh Bencana. Penghargaan ini berupa sertifikat dan pengakuan pada acara-acara tertentu, seperti peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana setiap tanggal 30 September. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi dan antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

Namun, penghargaan ini bersifat non-materi dan tidak termasuk insentif finansial. Lebih lanjut, BPBD tidak menerapkan sistem sanksi atau hukuman formal terhadap peserta yang kurang aktif. Pendekatan ini menekankan kesadaran masyarakat, keterlibatan, dan partisipasi sukarela. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh (Frinaldi, 2017), pendekatan persuasif BPBD terbukti efektif dalam mempertahankan keterlibatan masyarakat sepanjang program.

6) Nilai dan Kepercayaan

Nilai-nilai dan keyakinan mendasari perilaku individu dan kolektif dalam melaksanakan kegiatan sosial dan profesional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai dan keyakinan sangat penting untuk implementasi program Kelurahan Tangguh Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang tidak mengadopsi sistem kebijakan *Top-down*, melainkan membangun berdasarkan pengalaman, potensi, dan pengetahuan lokal yang dikembangkan di dalam masyarakat.

Nilai-nilai kerja sama timbal balik, solidaritas sosial, kepedulian terhadap sesama, dan semangat solidaritas merupakan aset sosial utama untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana. Lebih lanjut, masyarakat terus menggunakan berbagai bentuk pengetahuan lokal *(local wisdom)*, seperti kentongan (gendang kayu tradisional) sebagai sistem peringatan dini jika terjadi bencana. Keberhasilan program Keltana diukur tidak hanya dari jumlah peserta pelatihan, tetapi juga dari kapasitas masyarakat untuk menyebarluaskan pengetahuan terkait bencana. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai solidaritas dan kesadaran sosial telah menjadi bagian integral dari budaya kesiapsiagaan bencana masyarakat. Temuan ini sejalan dengan yang disamapikan oleh (Frinaldi, 2017), yang menekankan bahwa nilai-nilai dan

keyakinan merupakan elemen penting dalam membentuk budaya kerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dan masyarakat.

b. Sadar Bencana

1) Persepsi Risiko

Persepsi risiko mengacu pada bagaimana individu memahami potensi bencana dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keselamatan pribadi. Tingkat persepsi risiko dalam suatu komunitas memengaruhi kewaspadaan dan kesiapan mereka dalam menghadapi ancaman bencana.

Hasil peneltian menunjukkan bahwa komunitas yang tergabung dalam Kelompok Siaga Bencana (KSB) menunjukkan tingkat persepsi risiko yang relatif tinggi terkait berbagai ancaman bencana di wilayah mereka. Sebagian besar responden menyadari bahwa daerah pesisir Kota Padang, khususnya kecamatan Pasia Nan Tigo, Padang Sarai, dan Berok Nipah, rentan terhadap banjir pesisir, gempa bumi, dan tsunami. Mereka memahami bahwa bencana-bencana ini dapat menyebabkan kerusakan harta benda, mengganggu kegiatan ekonomi, dan membahayakan keselamatan warga.

Lebih lanjut, masyarakat mampu mengenali berbagai tanda peringatan akan datangnya bencana. Dalam kasus banjir rob, curah hujan lebat yang disertai pasang tinggi dianggap sebagai tanda peningkatan risiko banjir. Selain itu, dalam menghadapi ancaman tsunami, masyarakat mengenali indikator seperti gempa bumi kuat, permukaan laut yang sangat rendah, dan informasi peringatan dini yang disebarkan oleh instansi terkait. Hal ini sejalan dengan konsep kesadaran bencana yang disampaikan oleh UNDRR (2017), yang menyatakan bahwa masyarakat tidak hanya menyadari ancaman bencana tetapi juga memahami tingkat risiko dan potensi dampaknya. Pemahaman ini mendorong mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai kegiatan peningkatan kesadaran, sesi pelatihan, dan simulasi bencana yang dilaksanakan dalam kerangka program Kelurahan Tangguh Bencana.

2) Pengetahuan

Kesadaran risiko bencana mencakup pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis bencana, tanda-tanda peringatan, langkah-langkah mitigasi, dan tindakan yang harus diambil sebelum, saat, dan setelah bencana. Pengetahuan yang memadai sangat penting untuk memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi berbagai ancaman bencana.

Program Kelurahan Tangguh Bencana memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bencana. Kesadaran ini diperoleh melalui berbagai kegiatan, seperti peningkatan kesadaran, pelatihan, simulasi, diskusi kelompok, pendampingan masyarakat, dan pendidikan, sosialisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Palang Merah Indonesia (PMI), Gugah Nurani Indonesia (GNI), dan berbagai organisasi penanggulangan bencana lainnya. Lebih lanjut, pendekatan partisipatif yang diterapkan dalam program ini memberdayakan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi ancaman di lingkungan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami kondisi di wilayah mereka dan risiko yang mereka hadapi. Berdasarkan temuan penelitian, indikator pengetahuan selaras dengan konsep yang disampaikan oleh UNDRR (2017), yang menunjukkan bahwa program Keltana mampu meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memahami risiko bencana, mengenali tanda-tanda peringatan, dan mengetahui langkah-langkah mitigasi yang harus diambil pada setiap tahapan bencana.

3) Sikap

Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya. Dalam hal kebencanaan, sikap positif mendorong individu untuk lebih peduli, waspada, dan aktif berpartisipasi dalam upaya pengurangan risiko.

Program Kelurahan Tangguh Bencana telah memberikan dampak positif pada sikap masyarakat, khususnya di kelurahan Padang Sarai dan Pasia Nan Tigo. Perubahan ini menghasilkan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, pemeliharaan sistem drainase, kesiapsiagaan darurat, dan kemauan yang lebih besar untuk

membantu sesama di saat bencana. Bahkan, beberapa anggota KSB memandang pengelolaan bencana sebagai tanggung jawab sosial yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Namun, situasinya berbeda di kelurahan Berok Nipah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian warga masih memiliki kesadaran lingkungan yang rendah. Hal ini terlihat dari kebiasaan membuang sampah di sekitar Kalimati, praktik ini masih umum terjadi di kalangan sebagian warga. Padahal, telah banyak dilakukan kegiatan penyuluhan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dan KSB mengenai dampak buruknya pengelolaan lingkungan terhadap peningkatan risiko banjir. Perilaku ini menunjukkan bahwa pengetahuan saat ini belum diterjemahkan ke dalam sikap yang kondusif untuk pengurangan risiko bencana.

Pembuangan limbah di sekitar Kalimati mengganggu aliran sungai dan mempercepat sedimentasi, sehingga mengurangi kapasitas penyerapannya. Oleh karena itu, risiko banjir saat hujan lebat atau pasang tinggi air laut meningkat. Selain itu, tidak adanya vegetasi dan cekungan penampungan air di daerah pemukiman menunjukkan kurangnya perhatian terhadap pengelolaan lingkungan. Padahal, vegetasi dan ruang hijau memainkan peran penting dalam mengurangi limpasan dan meningkatkan kapasitas penyerapan tanah. Situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan dalam pencegahan bencana perlu diperkuat lebih lanjut. Dengan demikian, implementasi sadar bencana yang dilakukan di Kelurahan Berok Nipah menunjukkan bahwa indikator sikap tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep kesadaran bencana yang disampaiakn oleh UNDRR (2017), karena pengetahuan masyarakat belum diterjemahkan ke dalam sikap yang kondusif untuk pengurangan risiko bencana.

4) Perilaku

Perilaku merupakan manifestasi nyata dari budaya kesadaran bencana, yang tercermin dalam tindakan masyarakat dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Perilaku ini merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dan pengetahuan tentang bencana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesadaran bencana telah berkembang di dalam masyarakat, khususnya di antara anggota Kelompok Siaga Bencana (KSB). Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan penanggulangan bencana, seperti mengikuti pelatihan, simulasi, dan kampanye kesadaran rutin. Lebih lanjut, masyarakat telah mengambil berbagai langkah kesiapsiagaan, seperti menyusun perlengkapan darurat yang berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, senter, dan perlengkapan darurat lainnya.

Kesadaran bencana juga ditunjukkan dengan identifikasi titik kumpul keluarga dan rute evakuasi yang harus diikuti jika terjadi gempa bumi atau tsunami. Selain itu, masyarakat berperan dalam menyebarkan informasi tentang bencana melalui berbagai saluran komunikasi, seperti grup *WhatsApp*, jaringan asosiasi lingkungan (RT/RW), dan Kelompok Siaga Bencana (KSB). Ketika bencana terjadi, masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam evakuasi, pendaftaran korban, pengelolaan dapur umum, pendistribusian bantuan, dan berbagai respons darurat lainnya. Pengamatan ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat tersebut mencerminkan penerapan budaya pencegahan bencana, sehingga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih siap dan lebih tangguh terhadap berbagai ancaman.

2. Faktor Penghambat dalam Pembentukan Budaya Kerja Sadar Bencana dalam Mewujudkan Masyarakat Tangguh Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang.

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh para stakeholder dalam mengimplementasikan budaya kerja sadar bencana sebagai upaya mewujudkan masyarakat tangguh di Kota Padang. Kendala tersebut diidentifikasi melalui proses analisis data menggunakan teknik pengkodean (coding), kemudian diinterpretasikan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Penggunaan teori ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi implementasi di lapangan (Posumah, 2023).

a. Komunikasi

Salah satu hambatan dalam membangun budaya kerja yang sadar bencana terletak pada rendahnya kesadaran lingkungan di beberapa komunitas. Meskipun ada upaya peningkatan kesadaran di bawah Program Kelurahan Tangguh Bencana mengenai pentingnya kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, perilaku masyarakat setempat terus menyebabkan penyumbatan saluran drainase akibat penumpukan sampah. Situasi ini menunjukkan bahwa pesan pencegahan yang disampaikan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam praktik sehari-hari masyarakat.

Keefektifan komunikasi sebagian besar bergantung pada tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap informasi yang disebarkan. Dalam penelitian ini, informasi terkait bencana disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti grup WhatsApp, media sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kelompok Siaga Bencana (KSB), Asosiasi Lingkungan (RT/RW), dan kegiatan penyuluhan langsung. Namun, kapasitas masyarakat untuk menerima dan memahami informasi ini bervariasi. Perbedaan tingkat pendidikan, usia, pengalaman dengan bencana, dan keterlibatan dalam penanggulangan bencana menjelaskan dampak yang berbeda dari pesan yang disampaikan kepada setiap individu.

Akibatnya, kesadaran risiko bencana belum sepenuhnya berkembang menjadi nilai kolektif yang dianut oleh seluruh masyarakat. Sebagian warga telah menunjukkan tingkat kesiapan yang tinggi dan secara aktif berpartisipasi dalam langkah-langkah pencegahan, sementara yang lain tetap pasif dan hanya terlibat secara minimal dalam upaya pengurangan risiko bencana atau perlindungan lingkungan.

b. Sumber Daya

Salah satu faktor yang menghambat pengembangan budaya kerja yang sadar bencana adalah keterbatasan sumber daya. Pertama, kendala anggaran menjadi hambatan utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan terkait bencana. Menurut teori implementasi oleh Edward III, implementasi kebijakan tidak dapat optimal tanpa dukungan keuangan yang memadai, meskipun tujuan program telah didefinisikan dengan jelas dan mereka yang bertanggung jawab atas implementasi sangat berkomitmen.

Pendanaan yang terbatas berdampak pada berbagai aspek implementasi program, seperti pengadaan peralatan manajemen bencana, pelatihan dan simulasi, kegiatan penjangkauan masyarakat, operasional Kelompok Siaga Bencana (KSB), dan peningkatan kapasitas relawan. Keterbatasan ini mencegah kelancaran pelaksanaan beberapa kegiatan yang seharusnya dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Akibatnya, pengembangan budaya manajemen bencana berjalan lebih lambat dari yang diantisipasi.

Lebih lanjut, kendala anggaran berarti bahwa anggota GPC harus secara mandiri menanggung kebutuhan operasional tertentu. Beberapa anggota bahkan menggunakan dana pribadi mereka untuk membeli seragam, peralatan pendukung, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk operasional organisasi. Ketergantungan pada sumber daya pribadi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program tetap sangat bergantung pada komitmen individu. Jika situasi ini berlanjut, hal itu berpotensi mengurangi motivasi anggota dan membahayakan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Situasi ini menunjukkan bahwa dukungan sumber daya pemerintah belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan implementasi program di lapangan.

Kedua, kurangnya peralatan tanggap darurat juga menghambat adopsi budaya kerja yang sadar risiko bencana. Penelitian menunjukkan bahwa anggota KSB memiliki pengalaman yang luas, pengetahuan mendalam, dan kemauan yang kuat untuk membantu masyarakat selama bencana. Namun, kapasitas ini tidak didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Kurangnya peralatan darurat menyebabkan prosedur evakuasi yang suboptimal, berkurangnya mobilitas sukarelawan selama masa baktinya, meningkatnya risiko keselamatan, lambatnya respons bencana, dan operasi tanggap darurat yang kurang efektif. Dengan demikian, kurangnya fasilitas merupakan manifestasi nyata dari kurangnya sumber daya untuk mendukung implementasi program.

Ketiga, kebutuhan untuk membangun kapasitas anggota KSB juga merupakan faktor penting yang membutuhkan perhatian khusus. Sumber daya manusia tidak hanya diukur dari jumlah orang yang tersedia, tetapi juga dari kualitas keterampilan mereka. Meskipun anggota KSB aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tanggap bencana, meningkatnya kompleksitas ancaman menuntut pembangunan kapasitas yang berkelanjutan. Tanpa pelatihan dan peningkatan kapasitas yang memadai, kemampuan relawan untuk menanggapi keadaan darurat akan terbatas. Oleh karena itu, kebutuhan akan peningkatan kapasitas di dalam KSB menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada masih membutuhkan dukungan berkelanjutan dalam pengembangan keterampilan.

Keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung pengurangan risiko bencana belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya pelebaran aliran sungai, perbaikan sistem drainase secara komprehensif, serta kebutuhan akan pengerukan saluran air dan penguatan perlindungan kawasan pesisir yang masih belum terpenuhi. Keterbatasan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya diwujudkan melalui penyediaan sarana fisik yang memadai, sehingga banjir dan banjir rob masih sering terjadi dan terus menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir.

Pembangunan infrastruktur yang tidak memadai ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana masih menghadapi berbagai keterbatasan selama fase implementasi. Akibatnya, ancaman banjir dan genangan pesisir tetap menjadi masalah utama bagi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, perlu memperkuat dukungan kelembagaan dan mempromosikan perencanaan tata guna lahan yang lebih terintegrasi agar upaya pengurangan risiko bencana dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Strategi dalam Peningkatan Budaya Kerja Sadar Bencana dalam Mewujudkan Masyarakat Tangguh Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang

Penguatan budaya kerja yang berfokus pada pencegahan bencana merupakan langkah strategis dalam mendukung terciptanya masyarakat yang tangguh terhadap bencana di Padang. Mengingat kerentanan khusus wilayah kelurahan Padang Sarai, Pasia Nan Tigo, dan Berok Nipah ini terhadap berbagai ancaman bencana, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan peristiwa cuaca ekstrem, keterlibatan aktif masyarakat sangat penting di setiap tahap pengurangan risiko. Melalui program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana), Pemerintah Kota Padang, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berupaya meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat agar masyarakat dapat mengantisipasi, menanggapi, dan pulih secara mandiri setelah bencana. Upaya ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, termasuk kampanye kesadaran, pelatihan, simulasi bencana, pembentukan forum pengurangan risiko, dan peningkatan kapasitas bagi Kelompok Siaga Bencana (KSB).

Berbagai program yang dilaksanakan oleh BPBD kota Padang menggambarkan proses pengintegrasian nilai-nilai kesiapsiagaan bencana di dalam masyarakat. Kesadaran akan risiko bencana tidak lagi dianggap semata-mata sebagai tanggung jawab pemerintah, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam latihan evakuasi, pengembangan peta risiko bencana, dan partisipasi aktif dalam forum bencana tingkat desa.

Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah memperkuat komunikasi bencana untuk mengubah perilaku masyarakat. Strategi ini diimplementasikan ke dalam kampanye kesadaran bencana secara berkala, termasuk pertemuan masyarakat, kegiatan kelurahan, sosialisasi, dan berbagai bentuk pendidikan yang secara langsung melibatkan masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan ini, masyarakat didorong untuk memahami risiko bencana dan memperkuat kesiapsiagaan daruratnya.

Selain komunikasi langsung, penyebaran informasi bencana juga memanfaatkan media digital, seperti grup *WhatsApp* dan media sosial. Penggunaan teknologi komunikasi ini dianggap efektif karena memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas kepada publik mengenai kondisi cuaca ekstrem, risiko banjir, peringatan dini, dan kegiatan terkait bencana lainnya.

Pendekatan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan strategi komunikasinya dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Upaya untuk mengembangkan budaya kesadaran bencana juga dilakukan melalui simulasi dan latihan. Simulasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga pengalaman praktis mengenai tindakan yang harus diambil jika terjadi bencana. Salah satu contoh latihan tersebut adalah latihan *drill tsunami* yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Padang, bekerja sama dengan berbagai stakeholder, pada tanggal 5 November 2025. Latihan ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan masyarakat dan menguji efektivitas prosedur evakuasi yang telah ditetapkan.

Meskipun terdapat kendala anggaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Padang terus mengalokasikan dana untuk program Kelurahan Tangguh Bencana. Dukungan ini berupa pelatihan, pendampingan, penyediaan peralatan, dan fasilitasi berbagai kegiatan terkait bencana di tingkat kelurahan. Meskipun anggaran yang tersedia masih terbatas, inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat.

Selain dukungan pemerintah, keberlanjutan program ini juga bergantung pada partisipasi masyarakat dan kemandirian. Anggota KSB menyumbangkan waktu, energi, dan dukungan finansial mereka untuk berbagai kegiatan terkait bencana secara sukarela. Hal ini menunjukkan komitmen kuat para relawan terhadap kegiatan pengurangan risiko bencana dan menggarisbawahi peran penting masyarakat dalam memastikan keberlanjutan program pengelolaan bencana lokal. Untuk mengatasi kekurangan infrastruktur dan sumber daya tanggap bencana, pemerintah mendistribusikan perlengkapan dasar ke Kelompok Siaga Bencana (KSB), termasuk tenda darurat dan kotak P3K. Bantuan ini berkontribusi pada kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Budaya kerja sadar bencana di Padang telah mengalami kemajuan signifikan karena adanya implementasi program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana) yang konsisten. Program ini berkontribusi pada pemahaman masyarakat yang lebih baik tentang risiko bencana, peningkatan kesadaran akan risiko tersebut, dan peningkatan kesiapan masyarakat menghadapi gempa bumi, banjir rob, abrasi dan tsunami. Dari perspektif budaya kerja, kepemimpinan dan komunikasi berfungsi secara efektif melalui berbagai kegiatan seperti kampanye kesadaran, pelatihan, simulasi bencana, dan penggunaan berbagai media untuk penyebaran informasi. Lebih lanjut, masyarakat mulai memahami pentingnya kesiapan, termasuk langkah-langkah penyelamatan diri dan prosedur evakuasi yang harus diikuti jika terjadi bencana.

Namun, budaya pencegahan bencana ini belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kendala masih ada dan menghambat proses ini: rendahnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan lingkungan, penyebaran dan penerimaan informasi bencana yang tidak merata, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya keberlanjutan kelembagaan di tingkat masyarakat. Kondisi ini berarti bahwa kesadaran bencana cenderung berfokus pada implementasi program-program tertentu dan belum sepenuhnya berkembang menjadi budaya kolektif, independen, berkelanjutan yang diterapkan secara konsisten di semua lapisan masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, bekerja sama dengan pihak kecamatan dan *stakeholder* lainnya, telah melakukan berbagai tindakan untuk memperkuat kesadaran bencana. Tindakan-tindakan ini meliputi program pendidikan dan peningkatan pengetahuan, latihan evakuasi dan pelatihan kesiapan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan dan mitigasi risiko bencana. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh, adaptif, dan siap siaga, sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana di Padang.

B. Saran

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang perlu untuk mengintensifkan dan memperluas kegiatan penyadaran, pendidikan, dan simulasi bencana guna memastikan informasi dan pengetahuan tentang bencana dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini akan terus meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

2. Pemerintah Kota Padang hendaknya memperkuat infrastruktur dan peralatan yang mendukung pencegahan bencana, khususnya di daerah pesisir yang sangat rentan terhadap tsunami dan banjir pesisir, seperti desa Padang Sarai, Pasia Nan Tigo, dan Berok Nipah. Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada efektivitas upaya pengurangan risiko bencana di daerah-daerah tersebut.
3. Pemerintah hendaknya meningkatkan dukungan anggaran dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana. Dukungan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program dan meningkatkan kualitas kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat masyarakat.
4. Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB), bekerja sama dengan pemerintah desa, hendaknya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap desa-desa tangguh bencana yang telah didirikan. Langkah ini diperlukan untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
5. Untuk memperkuat kesadaran lingkungan dalam budaya pencegahan bencana, pemerintah dan masyarakat harus mengoptimalkan kegiatan mitigasi berbasis lingkungan. Kegiatan ini dapat diimplementasikan melalui penanaman mangrove, proyek pengabdian masyarakat untuk membersihkan daerah aliran sungai (BGD) dan wilayah Kalimati, serta pelestarian ekosistem pesisir, yang berperan penting dalam mengurangi dampak bencana.
6. Masyarakat diminta untuk berperan tidak hanya sebagai penerima informasi bencana, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam semua upaya pengurangan risiko bencana. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan bencana akan menjadi faktor penentu dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

DAFTAR PUSTAKA

BNPB. (2012). PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA. *Bnpb*, *1095*, 1–31. www.peraturan.go.id

BPBD Kota Padang. (2023). *Rencana Penanggulangan Bencana Kota Padang Provinsi Sumatera Barat*.

Burhan Bungin, M. I. (2022). *Qualitative Data Analysisis Manual Data Analysis Procedure (MDAP)*.

Frinaldi, A. (2017). *Mengelola Budaya Organisasi dan Budaya Kerja*. Sukabina Press.

Geospasial, B. I. (2026a). *Ina-Geoportal*.

Geospasial, B. I. (2026b). *Ina-Geoportal*. https://geoportal.big.go.id/#/

Lafaila, W., Aisya, A., Alfino, R. A., Muhammad, H. K., Fakhrudin, A., & Lucy, L. A. (2022). IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI KINERJA KARYAWAN DI PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR COUNTER AGEN PARK ROYAL SIDOARJO. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *9*(2), 19–24.

Parassa, H. S., Sirnan, S., & Annas, A. (2024). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Regulasi dan Budaya Sadar Bencana di Masyarakat Perkotaan: Studi kasus di Kota Makassar. *Journal of Governance and* …. https://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/1521

Posumah, J. H. (2023). Implementasi Kebijakan dalam Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tompaso BAru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, *IX*(3), 339–350.

Raditya Jati, Lu'lu Muhammad, K. P. N. (2024). *Culture and institutions for disaster preparedness*.

Sari, N. F. (2022). *Manajemen Program Kelurahan Tangguh Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang* [Universitas Andalas]. http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/114163

Susetya Herawati, Dadang Subarna, A. S. C. (2021). *Pengurangan Risiko Bencana* (Vol. 32, Issue 3).